

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik Teori proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Briliant.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Malempi, L., Ogotan, M., & Dengo, S. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Lianastasia Malempi Martha Ogotan Salmin Dengo*.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170.

Sutrisna, W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa. *Jurnal Cakrawarti* (Vol. 04).

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6 (2), 41-52
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Perundang-undangan

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa Persiapan dan Tunjangan Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Artikel

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1097/5/121801025_file%205.pdf. {Diakses pada 16 Februari 2023}

Syaukani dkk. 2004 : 295. *Artikel Definisi tentang Implementasi menurut ahli* (www.dosenpendidikan.com)

<https://seputarriau.co/amp/detail/15857/pj-kades-binanga-dua-akui-ada-intervensi-terkait-perekrutan-kadus>

Skripsi

Siregar, Y. S. (2023). *Implementasi Kebijakan Fungsi BPD (BPD) di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Malikussaleh: Lhokseumawe.

